

MANAJEMEN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERPARKIRAN DI KOTA MANADO

Oleh:
Riandi Lasahinda¹

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh manajemen pemerintah dalam penataan perpustakaan di kota manado yang belum berjalan maksimal karena masih ditemukannya masalah dalam hal pengelolaan, ketersediaan sarana dan parsarana yang belum memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang manajemen pemerintah dalam penataan perpustakaan di kota manado. Teori yang digunakan menurut George. R. Terry dalam (Hasibuan, 2012:16) yaitu manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado, Seksi UPT Perpustakaan, Bidang Lalulintas dan Jalan, Masyarakat. Temuan penelitian menunjukan terkait dengan penataan perpustakaan di Kota Manado, dapat dikatakan tidak maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: manajemen pemerintahan dari sisi perencanaan belum dijalankan secara maksimal, masih perlu pembenahan dalam berbagai sistem yang ada, kurang koordinasi serta kurang ketegasan dan pengawasan yang belum maksimal dalam hal evaluasi, sanksi dan alternatif solusi. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam berbagai segi, sistem yang jelas, dan peningkatan pengawasan.

Kata Kunci: Manajemen; Penataan; Perpustakaan

ABSTRACT

This research is motivated by government management in managing parking in Manado city which has not been running optimally because there are still problems in terms of management, the availability of facilities and inadequate facilities. The purpose of this study was to determine and analyze government management in parking arrangements in the city of Manado. The theory used according to George. R. Terry in (Hasibuan, 2012: 16) that management is a distinctive process, which consists of Planning, Organizing, Actuating and Controlling actions. The research method used is a qualitative approach, data collection through observation, interviews and documentation studies. The informants consisted of the Head of the Manado City Transportation Agency, the UPT Parking Section, the Traffic and Road Sector, the Community. The findings of the study show that it can be said that it is related to the arrangement of estimates in the city of Manado, which is not maximal. This is due to several things including: government management in terms of planning has not been implemented optimally, still needs improvement in various existing systems, lack of coordination and lack of decisiveness and supervision that has not been maximal in terms of evaluation, sanctions and alternative solutions. This requires careful planning in various aspects, a clear system, and increased supervision.

Keywords: Management; Arrangement; Parking

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar akibat sifat konsumtif manusia merupakan salah satu penyebab kurangnya ketersediaan lahan parkir. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan lahan parkir di dalam beberapa gedung atau bangunan yang didirikan. Namun, kapasitas lahan-lahan parkir ini tidak seimbang dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada. Sehingga banyak kendaraan bermotor yang diparkir di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan. Selain itu, penyebab kurangnya ketersediaan lahan parkir adalah kesalahan konversi lahan. Banyak lahan terbuka yang di konversikan menjadi gedung bertingkat seperti apartemen dan mall. Seharusnya lahan-lahan terbuka ini bisa dikonversikan menjadi lahan parkir.

Keberadaan petugas parkir kadang dirasakan sangat membantu dalam menjaga kendaraan yang kita miliki, dan kita dapat menyelesaikan tugas tanpa adanya kekhawatiran kehilangan. Tidak sampai disini masih perlu adanya peningkatan petugas parkir untuk mengoptimalkan kerja mereka. Ditempat yang memiliki urusan sosial seperti kampus dan kantor tidak hanya pengoptimalan petugas saja akan tetapi area, metode, keamanan, kenyamanan dan kecepatan juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan pelayanan yang terbaik namun terkadang keberadaan parkir di tepi jalan sangat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Akibatnya, banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir seadanya. Kawasan pusat kota biasanya persediaan ruang parkir sangat terbatas, terutama area parkir di luar sisi jalan. Jika tidak ada penyediaan ruang parkir yang memadai cenderung menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir, sehingga mengakibatkan memburuknya kondisi lalu lintas, seperti kemacetan terutama pada jam - jam sibuk, permasalahan ini merupakan permasalahan yang akan menjadi sangat parah jika belum ada penanganan dengan serius baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Keperluan akan lahan parkir akan lebih terasa di sentral-sentral perekonomian perkotaan. Situasi ini tentunya bukan kondisi ideal ketika berbicara terkait dengan peningkatan perekonomian dan kualitas hidup di perkotaan. Tujuan pengelolaan perparkiran tidak saja sekedar mendapatkan retribusi parkir sebanyak-banyaknya, tetapi lebih dari itu yakni, mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan aksesibilitas di pusat kota, dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Masalah parkir juga merupakan masalah yang sering dialami oleh kota-kota besar di dunia. Masalah parkir jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah kemacetan lalu lintas, hal ini disebabkan karena pengaturan parkir yang tidak teratur. Peran pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah parkir sangat dituntut oleh masyarakat terutama pada daerah yang memiliki kualitas pelayanan yang baik dalam sektor apa saja yang menyangkut kepentingan masyarakat, maka tidak heran kalau daerah tersebut memiliki kemajuan yang pesat dibandingkan daerah lainnya.

Parkir ini menjadi suatu masalah jika tidak dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada sehingga dapat terjadi kekacauan jika tidak dilakukan dengan baik, semakin banyaknya kendaraan tiap tahunnya baik kendaraan roda dua maupun roda empat dan dituntut pemerintah terkait lebih menyediakan lahan parkir atau mengendalikan angka kendaraan yang semakin meningkat.

Mengatasi masalah ini diperlukan suatu pengendalian dan perencanaan terhadap pengelolaan manajemen parkir yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, Perencanaan dengan berbagai variannya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil orang-orang yang berkompeten orang-orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan dan dapat mengatasi kendala dalam jangka panjang.

Perencanaan dapat pula dikatakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Salah satu contoh pengendalian yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan memberlakukannya sistem parkir otomatis yang sekarang masih sedikit sekali diterapkan hanya di tempat-tempat seperti mall dan rumah sakit, yang menggunakan sistem parkir otomatis tersebut, selain menekan angka kemacetan serta carut marut parkir yang disebabkan juru parkir liar, sistem parkir otomatis

semacam ini diharapkan dapat menambah hasil retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan unsur penting dalam pembangunan daerah sebagai tambahan pendanaan yang didapat dari hasil retribusi daerah. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan Undang undang Nomor. 28 Tahun. 2009, tentang pajak daerah dan restribusi daerah, merupakan peraturan yang penerapannya bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

DPRD Kota Manado telah meminta Dinas Perhubungan tegas untuk menertibkan parkir liar. Sebab, parkir liar tidak saja menimbulkan kemacetan tapi juga mengurangi retribusi yang masuk ke Pemkot Kota Manado, dalam Implementasinya banyak juru parkir di Kota Manado yang masih menyetorkan penghasilannya atau tidak menyetorkan dari penghasilannya di Dinas Perhubungan kota Manado sehingga tidak maksimal mengalirnya hasil dari retribusi daerah ke Pendapatan Asli daerah yang berfungsi untuk pembangunan daerah dan semakin kurang efisiensinya. Serta terkaitnya premanisme yang marak terjadi dan banyaknya perebutan lahan parkir yang terkadang menjadi kendala sosial yang seharusnya tidak terjadi sehingga jika dibiarkan terus menerus akan menjadi hal yang tidak pantas terjadi di masyarakat. pengelolaan parkir yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang pungli, tata fungsi lahan parkir, serta dapat meminimalisir angka pencurian kendaraan yang sering marak terjadi.

KAJIAN TEORI

• Pengertian Manajemen

Management berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Secara umum aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

(Hasibuan, 2012:16) menjelaskan pengelolaan adalah kinerja dan memperoleh hasil yang diinginkan dengan cara upaya kelompok yang terdiri dari pemanfaatan dan sumber daya manusia. Dalam perfektif lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki organisasi melalui kerja sama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

George R, Terry (2006:22) menyatakan dengan kata lain manajemen memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengefektifkan usaha organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, itulah manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, baik organisasi, industri, perbangkan, maupun pendidikan. Fungsi manajemen terdiri dari yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian(*organizing*), penggerakan(*Actuating*), dan pengawasan(*controlling*).

Ad.1. Perancangan adalah merupakan tindakan awal dalam aktifitas manajerial pada setiap organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, sehingga dengan demikian perencanaan adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik.

Ad.2. Pengorganisasian adalah hakekat pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen, maka terlebih dahulu dikemukakan arti organisasi, sebab organisasilah yang menjadi wadah bagi seluruh aktifitas manajerial, tak terkecuali pengorganisasian.

Ad.3. Pengarahan adalah setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasamanya dalam mencapai tujuan organisasinya. Pengarahan

meliputi pemberian petunjuk/memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personil organisasi agar secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat.

Ad.4. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai.

• **Pengertian Pemerintahan**

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”:

1. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah;

Dari pengertian pemerintahan sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa pemerintahan terdiri dari dua unsur yaitu unsur yang memerintah dan unsur yang diperintah. Dalam menjalankan pemerintahan dilakukan oleh badan yang berwenang atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam memberikan pelayanan publik (untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang diperintah. Pendapat lain yang sedikit berbeda dengan pengertian pemerintahan seperti dijelaskan sebelumnya yaitu pengertian pemerintahan dilihat dari pendekatan sistem. Hal ini seperti dikemukakan oleh Wasistiono (2013:39-40) bahwa pemerintah sebagai badan atau orang yang menjalankan pemerintahan, maupun pemerintahan sebagai fungsi dan kegiatan berpemerintahan adalah sebuah sistem. Ada tiga prinsip dasar yang perlu dipahami dalam melihat pemerintahan sebagai suatu sistem. Pertama, bahwa hubungan antara suprasistem, sistem, subsistem dan sub-subsistem diatur melalui berbagai asas yang perlu disepakati dan dipahami oleh semua anggota susunan sistem. Kedua, sistem yang berada dalam susunan yang lebih rendah dan lebih kecil tunduk pada mekanisme sistem yang susunannya lebih besar dan lebih tinggi, disertai mekanisme untuk mengajukan keberatan dari bawah. Ketiga, susunan sistem yang lebih besar dan lebih tinggi punya kewajiban melindungi dan memberdayakan susunan sistem yang lebih rendah dan lebih kecil.

Salah satu posisi dan peran pemerintah ditinjau dari pendekatan produk adalah pemerintah sebagai konsumen. Produk-produk yang diperintah yang dikonsumsi oleh pemerintah, antara lain informasi, inspirasi, dukungan (mosi percaya) dan yang dinilainya tertinggi adalah suara (vote). Sebaliknya, pemerintah juga adalah produser, penjual, dan distributor; produk yang dijual atau dihasilkannya adalah barang dan jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan atau disediakan oleh lembaga privat dan masyarakat; serta layanan civil.

Ryaas Rasyid (2007:43) mengemukakan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalani kehidupannya yang wajar. Pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurutnya adalah sebagai berikut.

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara tata tertib dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apa pun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan, di mana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta di mana perselisihan bisa didamaikan.
4. Melakukan pekerjaan/urusan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut maka tugas pemerintah adalah mengatur dan melayani masyarakat. Tugas pengaturan lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada jabatan birokrasi. Sedangkan tugas melayani menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, serta memberikan kepuasan kepada publik.

- **Pengertian Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan misalnya seperti tempat kawasan pariwisata diperlukan areal parkir. Pembangunan sejumlah gedung atau tempat-tempat kegiatan umum sering kali tidak menyediakan areal parkir yang cukup sehingga berakibat penggunaan sebagian lebar badan jalan untuk parkir kendaraan.

Dalam berparkir pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapih agar tak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Menurut penempatannya parkir dibagi menjadi : (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1998)

1. Parkir menurut tempatnya
 - a. Parkir dibadan jalan (*on street parking*)
Parkir dibadan jalan (*on steert parking*) dilakukan diatas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena parkir memanfaatkan badan jalan akan mengurangi lebar manfaat jalan sehingga dapat mengurangi arus lalulintas dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir dibadan jalan tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan.
 - b. Parkir diluar badan jalan (*of street parking*)
Parkir diluar adalah parkir yang dilakukan diluar badan jalan, seperti di halaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada taman parkir. Keuntungan dari parkir jenis ini adalah tidak mengganggu lalulintas dan keamanan lebih terjamin. Adapun kerugian adalah perlu biaya investasi awal yang besar, serta bagi pengguna kurang praktis apalagi jika hanya ingin parkir sebentar.
2. Berdasarkan Pengaturan Posisi Kendaraan
 - a. Parkir paralel
Parkir paralel merupakan parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu *bumper* belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik disisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan
 - b. Parkir tegas lurus

- Parkir dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan tegak lurus lorong atau gang, trotoar atau dinding.
- c. Parkir serong
Parkir serong merupakan cara parkir yang sering digunakan baik dibadan jalan maupun digedung parkir, karena cara ini lebih memudahkan kendaraan masuk dan keluar.
3. Berdasarkan jenis kendaraan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda).
 - b. Parkir untuk beroda dua atau bermesin (sepeda motor)
 - c. Parkir untuk kendaraan roda empat atau lebih yang bermesin (mobil, truck dan lain-lain)
Pengaturan ini bertujuan supaya tempat parkir lebih teratur dan juga untuk mengoptimalkan area parkir.
 4. Berdasarkan jenis mode angkutan, parkir dibedakan menjadi:
 - a. Parkir kendaraan bermotor meliputi parkir kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 (mobil penumpang), bus dan truck.
 - b. Parkir kendaraan tidak bermotor becak, sepeda dan delman

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Dasar penelitian adalah survei yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado. Menurut (Sugiyono, 2013:25) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pemerintah dalam penataan perparkiran di Kota Manado dengan menggunakan teori George. R. Terry (dikutip dalam Hasibuan, 2012:16).

PEMBAHASAN

Dalam mengkaji manajemen pemerintah dalam penataan perparkiran di Kota Manado, akan menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen menurut George. R. Terry (dikutip dalam Hasibuan, 2012:16) yaitu sebagai berikut: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*controlling*).

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan atau *planning*, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dan menurut George. R. Terry (dalam Hasibuan, 2012:16) *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, pelaksanaan perencanaan dan evaluasi perencanaan selanjutnya akan dijelaskan pada setiap aspek dalam perencanaan (*planning*).

Perencanaan atau rencana merupakan sebuah hasil dari pengambilan keputusan yang diambil dari alternatif-alternatif dengan memperhatikan aspek- aspek yang ada. Pengambilan keputusan terkait dasar peraturan. Penetapan zona parkir, dalam hal ini parkir tentu didasarkan atas peraturan yang berlaku. Langkah awal dalam perencanaan adalah pengambilan keputusan yang dibahas dalam sub indikator dalam perencanaan. Pengambilan keputusan sangat penting untuk merancang bagaimana perencanaan akan dilakukan, berlandaskan apa perencanaan dilakukan, dan bagaimana cara-cara atau alternatif yang akan diambil dalam

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang nantinya akan memudahkan dalam proses berikutnya.

Pengambilan keputusan yang diambil dalam manajemen parkir di Kota Manado yaitu diantaranya, penetapan aturan dasar, penetapan zona, dan Penetapan-penetapan tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Perencanaan (*planning*) awal dalam mencapai tujuan dan target yaitu optimalisasi parkir di Kota Manado. Berdasarkan observasi mengenai pengambilan keputusan manajemen parkir di Kota Manado maka di dapatkan bahwa aspek-aspek peraturan atau keputusan masih perlu perbaikan atau dilengkapi agar semakin jelas dalam apa yang akan direncanakan dalam manajemen parkir di Kota Manado. Karena beberapa penetapan belum diketahui alasannya dan berdasarkan apa penetapan itu dilakukan. Pelaksanaan perencanaan yang belum sesuai ini diakibatkan kurang matangnya perencanaan dan kurang matangnya persiapan kendala yang ditemui dilapangan. Pelaksanaan perencanaan yang menyimpang lain adalah di mana juru parkir disediakan untuk membantu pengguna parkir untuk memarkirkan kendaraann. Setelah dilaksanakan perencanaan maka perlu dilakukan evaluasi perencanaan agar kejadian-kejadian atau kekurangan yang ada dapat ditutupi sehingga tidak terjadi lagi pada perencanaan berikutnya, dan evaluasi perencanaan Manajemen parkir Kota Manado evaluasi perencanaan dilakukan secara berkala. Evaluasi sangat baik jika dilakukan secara berkala karena ini akan dapat menyelesaikan masalah secara singkat, hanya saja yang terjadi dilapangan adalah masalah belum teratasi meskipun evaluasi sudah dilakukan secara berkala. Berdasarkan masalah-masalah di atas maka perencanaan dalam manajemen parkir di Kota Manado belum dijalankan secara maksimal.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut George. R. Terry dalam (Hasibuan, 2012:16), pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika pembahasan di atas kita membicarakan mengenai Perencanaan maka pada pembahasan ini kita akan membicarakan bagaimana Pengorganisasian dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado, dilihat dari alat-alat, tugas, orang-orang dan lain sebagainya untuk optimalisasi penataan parkir di Kota Manado itu sendiri. Dalam pengorganisasian ada dua aspek yang akan dibahas yaitu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur adalah sebuah aturan yang dirancang yang digunakan sebagai batasan-batasan dalam pelaksanaan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa standar operasional prosedur adalah sebuah bentuk pengorganisasian yang dibuat berdasarkan perencanaan dan kesepakatan dari para pelaksana. Biasanya Standar operasional prosedur ada disetiap organisasi bahkan disetiap program.

Standar Operasional Prosedur dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado perlu dipertegas dan diperjelas serta disesuaikan dengan pelaksanaannya. aturan-aturan yang bersifat keseluruhan sedangkan SOP dalam ruang lingkup kecil belum tegas. Adapun SOP yang ada masih sulit dipahami khususnya untuk orang awam. Selain itu SOP yang lainnya adalah mengenai pemberian surat tugas untuk Koordinator. SOP yang lain masih belum jelas sehingga menimbulkan masalah yaitu salah satunya adalah terkait cara penataan parkir yang seharusnya.

Selanjutnya adalah Sumber Daya Manusia dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado. Belum jelasnya sistem rekrutment (hal ini berdasarkan hasil wawancara ditemukan belum ada aturan bagaimana juru parkir dipekerjakan atau direkrut), namun mereka mendapatkan SK sebagai bukti tugas mereka jelas. meskipun ada koordinator, tentu ini sangat disayangkan. Selanjutnya adalah tupoksi dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado. Tupoksi sudah ada, namun belum sampai kepada hirarki yang ada di bawahnya. Bahkan tupoksi terkait juru parkir belum ada, yang ada hanya tupoksi seksi perparkiran dan terminal. sehingga menyebabkan juru parkir berbuat semaunya. Untuk itu perlu penjabaran tupoksi sampai kepada hirarki yang paling bawah, agar lebih jelas tugas dan wewenangnya.

Dari ketiga penjabaran aspek-aspek di atas maka pengorganisasian dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado dapat disimpulkan masih perlu pembenahan yang signifikan baik dari segi sistem maupun aturan-aturan dasar yang mendasarinya.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau pengarahan (*Actuating*) yang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Menurut George. R. Terry (dalam Hasibuan, 2012:16), mendefinisikannya pergerakan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Dalam *actuating* mencakup terkait identitas juru parkir dan koordinasi antar pihak terkait penataan parkir. Oleh karena itu pembinaan perlu dilakukan agar pekerjaan dilakukan secara tepat.

Dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado penggerakan atau pengarahan (*actuating*) belum dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dikarenakan aspek terkait yaitu koordinasi antara pihak terkait masih kurang serius dilakukan. Penggerakan atau pengarahan tidak jauh berbeda dengan pengorganisasian, jika pengorganisasian mengatur kelompok, orang dan alat, namun jika penggerakan dan pengarahan lebih kepada motif kerja kepada bawahan, atau bagaimana atasan menjalin hubungan kerja yang baik dengan bawahannya hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan koordinasi.

Koordinasi dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado yaitu diantaranya: koordinasi kepala dinas dengan kepala UPT, koordinasi kepala UPT dengan Koordinator wilayah parkir, Koordinasi koordinator wilayah parkir dengan juru parkir, Koordinasi juru parkir dengan pengelola parkir informal. Koordinasi kepala dinas dengan kepala UPT hanya sekedar pemberian tugas dan wewenang dan tanggungjawab, sedangkan koordinasi Kepala UPT dengan Koordinator parkir juga hanya terkait penyerahan setoran, tugas, wewenang dan tanggung jawab, Koordinasi koordinator wilayah parkir dengan juru parkir hanya terkait penagihan setoran dari juru parkir, dan yang terakhir adalah koordinasi antara juru parkir dan pengelola parkir informal juga sama terkait penyeteroran.

Dalam hirarki seharusnya tidak ada yang dinamakan pengelola parkir informal atau penguasa lahan, karena semuanya harusnya dikelola oleh pemerintah daerah sehingga seharusnya tidak ada yang dinamakan penguasa lahan atau preman. Hal-hal di atas adalah alasan mengenai belum maksimalnya penggerakan atau pengarahan atau *actuating* dilakukan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam setiap perencanaan, target dan kegiatan yang dilakukan pasti di dalamnya terdapat pengawasan. Pengawasan dilakukan agar pekerjaan atau rencana dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akan merugikan banyak pihak tapi menguntungkan satu pihak. Menurut George. R. Terry (dalam Hasibuan, 2012:16), fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Pengawasan harus dilakukan oleh orang berdiri secara netral dan dilakukan secara berkala. Dalam pengawasan mencakup evaluasi kerja, sanksi dan alternatif solusi.

Pengawasan atau *controlling* dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado dibagi menjadi beberapa sub indikator yaitu diantaranya evaluasi kerja, sanksi dan alternatif solusi. Evaluasi Kerja dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado belum memberikan dampak yang positif terhadap kinerja atau penataan parkir di Kota Manado. Hal ini dikarenakan evaluasi belum dilakukan dengan serius. Selain itu memang evaluasi dilakukan secara berkala hanya saja belum melibatkan juru parkir sebagai ujung tombak pelaksana dilapangan. Disamping itu ukuran evaluasi kerja untuk juru parkir belum ada sehingga penilaian atau evaluasi belum jelas. Dan juga evaluasi yang dilakukan seharusnya memberikan dampak yang

positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sehingga belum terjadi peningkatan dalam penataan parkir di Kota Manado.

Temuan penelitian menggambarkan memang valuasi kinerja dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Manado. Pengawasan dilakukan dengan cara berkelilingnya koordinator ke tempat-tempat parkir. Namun terkait sanksi dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado ternyata tidak adanya sanksi yang tegas. Selain itu dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado belum ada alternatif solusi yang mampu mengatasi masalah yang ada. Sedangkan masalah lain seperti, keluhan pengguna parkir, pengupahan, rekrutment, dan penguasa lahan belum ada solusi yang mengatasi masalah tersebut.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam manajemen Penataan parkir di Kota Manado belum dilaksanakan dengan maksimal, masih perlu pembenahan yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado terkait pengawasan karena pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui kesalahan diri agar tidak terulang kembali.

PENUTUP

Manajemen parkir Kota Manado jika dilihat dari sisi perencanaan sudah dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi sangat baik jika dilakukan secara berkala karena ini akan dapat menyelesaikan masalah secara singkat. Hanya saja yang terjadi dilapangan adalah masalah belum teratasi meskipun evaluasi sudah dilakukan secara berkala. maka perencanaan dalam manajemen parkir di Kota Manado dapat dikatakan belum maksimal. Dari sisi pengorganisasian, manajemen penataan parkir di Kota Manado dapat disimpulkan masih perlu pembenahan yang signifikan baik dari segi sistem maupun aturan-aturan dasar yang mendasarinya. Sedangkan dari sisi pergerakan atau pengarahan (*actuating*), belum dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan aspek terkait yaitu koordinasi antara pihak terkait masih kurang serius dilakukan. Disamping itu dari sisi pengawasan dalam manajemen penataan parkir di Kota Manado belum memberikan dampak yang positif terhadap kinerja atau penataan parkir di Kota Manado. Hal ini di karenakan evaluasi belum dilakukan dengan serius, karena walaupun evaluasi dilakukan secara berkala, namun karena belum melibatkan juru parkir sebagai ujung tombak pelaksana dilapangan, akibatnya hasilnya tidak maksimal. Hal itu diperparah karena ukuran evaluasi kerja untuk juru parkir belum ada sehingga penilaian atau evaluasi belum jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Ryaas Rasyid, Muhammad, 2007. *Makna Pemerintahan* Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinann. PT Mutiara Sumber Daya.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Penerbit: Alfabeta,
- Terry. G.R. (2006). *Prinsip-prinsip manajemen*. Illions: Richard D. Irwin Inc.
- Wasistiono. Sadu 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan* IPDN Press jatiningor. Sumedang, Bandung.

Sumber-Sumber Lain

- Pasal Undang-Undang Dasar 1945.
- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang undang Nomor. 28 Tahun. 2009, tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah